

Katalog : 9302023.8203



# 2018-2022

## **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN SULA MENURUT PENGELUARAN**

*Gross Regional Domestic Product  
of Kepulauan Sula Regency  
by Expenditure*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
*BPS-Statistics of Kepulauan Sula Regency*



[kepsulkab.bps.go.id](https://kepsulkab.bps.go.id)



*Jln. Yos Sudarso, KM.10, Desa Pohea,  
Kecamatan Sanana Utara,  
Kabupaten Kepulauan Sula*



Katalog : 9302023.8203



# 2018-2022

## **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEPULAUAN SULA MENURUT PENGELUARAN**

*Gross Regional Domestic Product  
of Kepulauan Sula Regency  
by Expenditure*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
*BPS-Statistics of Kepulauan Sula Regency*



[kepsulkab.bps.go.id](http://kepsulkab.bps.go.id)



*Jln. Yos Sudarso, KM.10, Desa Pohea,  
Kecamatan Sanana Utara,  
Kabupaten Kepulauan Sula*



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
MENURUT PENGELUARAN 2018-2022**

ISSN/ ISBN : -  
No. Publikasi : 82030.2005  
Katalog : 9302023.8203

Ukuran Buku : 21 cm X 29,7 cm  
Jumlah Halaman : ix + 67 halaman

Naskah:  
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik  
Desain Kover oleh:  
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Penerbit:  
BPS Kabupaten Kepulauan Sula

Pencetak:  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Sumber Ilustrasi: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **TIM PENYUSUN**

### **Penanggungjawab Umum:**

Ridwan, S.Si

### **Penyunting:**

Wisnu Candra Gumelar, S.Tr.Stat.

### **Penulis:**

Aditya Hanafi, S.Tr.Stat.

### **Pengolah Data:**

Aditya Hanafi, S.Tr.Stat.

### **Gambar Kulit:**

Fungsi IPDS BPS Kabupaten Kepulauan Sula



## KATA PENGANTAR

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Pengeluaran 2018-2022 merupakan kelanjutan dari penerbitan publikasi tahun-tahun sebelumnya yang disusun oleh BPS Kabupaten Kepulauan Sula. Angka PDRB dalam publikasi ini menggunakan PDRB dengan tahun dasar 2010 dengan penyempurnaan metodologi serta ruang lingkup dengan mengacu pada *System National Accounts 2008* (SNA 2008).

Publikasi ini menyajikan gambaran perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula secara deskriptif selama kurun waktu 2018-2022 melalui pendekatan pengeluaran dalam bentuk konsumsi, investasi, maupun ekspor impor. Dalam publikasi ini disajikan berbagai jenis tabel PDRB tahun 2018-2022 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase. Perlu diketahui bahwa angka PDRB tahun 2021 yang disajikan bersifat sementara sedangkan tahun 2022 bersifat sangat sementara.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan penyusunan publikasi mendatang.

Terimakasih.

Sanana Utara, 18 April 2023

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPALA,



Ridwan, S.Si

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto .....	7
<b>II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga .....	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga.....	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	21
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	24
2.5 Perubahan Inventori .....	28
2.6 Ekspor Impor .....	31
<b>III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA</b> .....	<b>33</b>
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran .....	35
<b>IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA</b> .....	<b>47</b>
4.1 PDRB Nominal .....	49
4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	51
4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	53
<b>V PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
<b>VI LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>
<b>VII DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman/ Page</b>
Tabel 1.1	Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	11
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2021	49
Tabel 4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022	51
Tabel 4.3	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022	54



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman/ Page</b>
Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022	36
Gambar 3.2 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022	38
Gambar 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022	40
Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022	42
Gambar 3.5 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022	45



## DAFTAR LAMPIRAN

		<b>Halaman/ Page</b>
Tabel 1	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2018-2022	63
Tabel 2	PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2018-2022	64
Tabel 3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2018-2022	65
Tabel 4	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2018-2022	66
Tabel 5	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2018-2022	67







**BAB  
1**

**PENDAHULUAN**



<https://ke.sukab.bps.go.id>



## Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*framework*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

---

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep-konsep penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>2</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

---

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Keterangan	
Y (Income)	PDRB Produksi
C (Consumption)	Konsumsi akhir
GFCF (Gross Fixed Capital Formation)	Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	Perubahan Inventori
X	Ekspor
M	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling*
- d. dan *forecasting*.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;

- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>3</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

### **Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010**

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang

---

<sup>3</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Tabel 1.1 Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor





**BAB  
2**

**METODE ESTIMASI DAN  
SUMBER DATA**



<https://kepo/kab.bps.go.id>



# Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

## Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>4</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

## Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

## Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotika
3. Pakaian dan alat kaki

---

<sup>4</sup> Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar
5. Perabot, alat rumah tangga, dan perbaikan rutin untuk rumah
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Pereengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

### **Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Proyeksi Penduduk 2020, BPS
- Proyeksi Penduduk SUPAS, 2015
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

## Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

# Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PKLNPRT)

## Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

## Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

## Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya

transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

### **Metode Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);

6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

# Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PKP)

## Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer.

Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar. Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

## Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun

percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

## **Cakupan**

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

## **Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

## Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output –

Penjualan barang dan jasa +

*Social transfer in kind purchased market production* +

Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

# Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

## Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

## Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of*

*Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

## Cakupan

Cakupan dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

## Sumber Data

Dalam melakukan penghitungan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terdapat berbagai macam jenis data yang diperlukan baik primer maupun sekunder. Data yang sekunder yang dibutuhkan dalam penghitungan PMTB bersumber dari kementerian maupun lembaga lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan data pendukung. Berikut ini merupakan jenis data yang digunakan untuk menghasilkan angka PMTB:

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS

- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

### Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

#### ✓ Metode Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

#### ✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga Konstan (t-1) x Indeks Produksi (t)

<https://kepsulkab.bps.go.id>

# Perubahan Inventori (PI)

## Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan

baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

## Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

## Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

## Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau deflasi berdasarkan jenis komoditas.

### a. Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku =  $\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$

PI atas dasar harga Konstan =  $\text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$

### b. Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan =  $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$

PI atas dasar harga Berlaku =  $\text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$

# Ekspor Impor

## Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

## Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

## Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

## Sumber Data

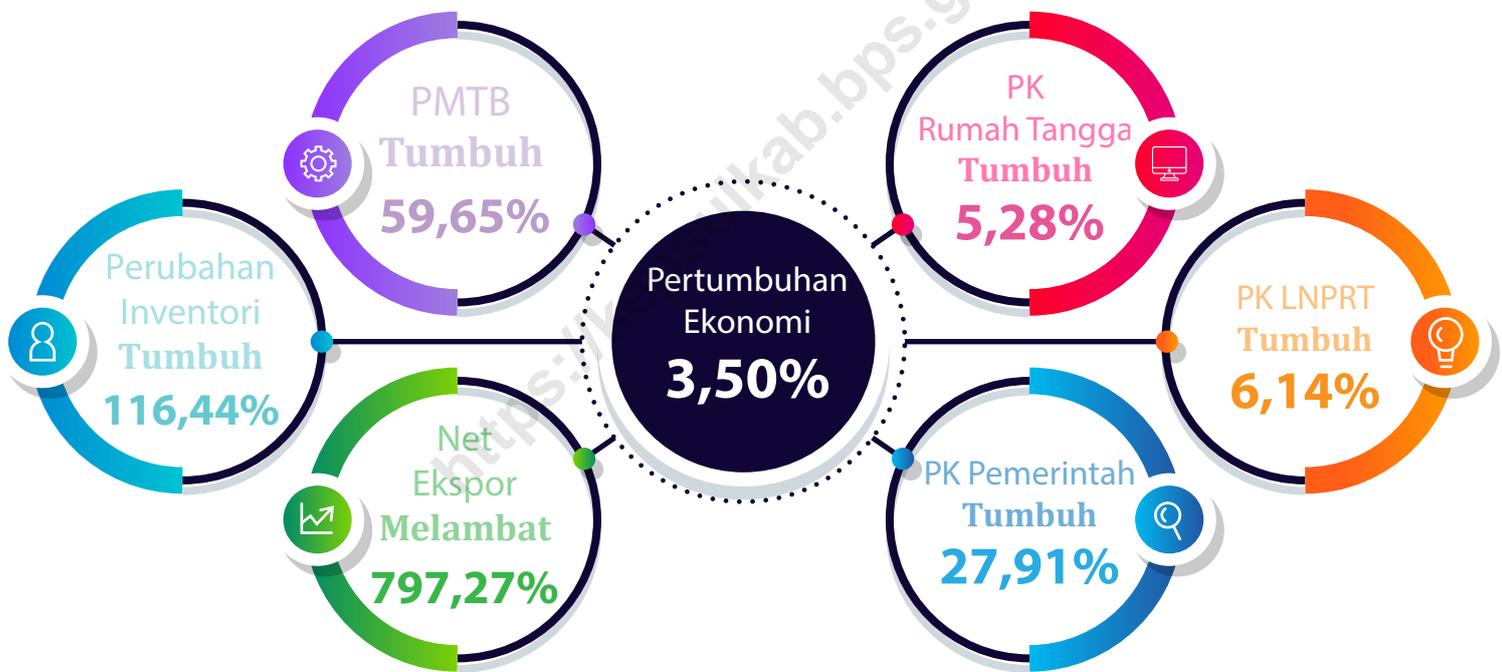
Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

# BAB 3

## TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA

### Pertumbuhan Ekonomi (persen) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2022\*



\* Angka sangat sementara



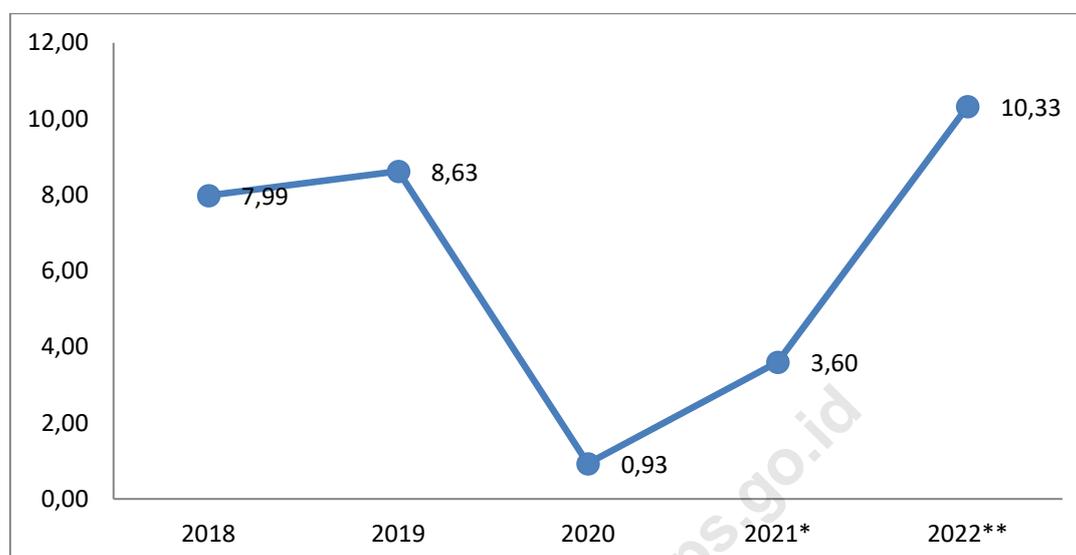
## Perkembangan PDRB Pengeluaran

Angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula menunjukkan tren fluktuatif dari waktu ke waktu. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula mencatat terjadi peningkatan positif laju pertumbuhan dari tahun 2018 hingga 2022. Rata-rata laju pertumbuhan sepanjang 2018 hingga 2022 mencapai 3,32 persen. Artinya, ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula mengalami cukup banyak perubahan positif dalam 5 tahun terakhir.

Pada tahun 2018, angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terhitung sebesar kurang lebih 2,29 triliun rupiah. Dari sisi pengeluaran, angka PDRB tersebut yakni sekitar 55,70 persen disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Angka PDRB tersebut selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2022 angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula terhitung sebesar 2,87 triliun rupiah. Kontribusi terbesar terhadap total PDRB disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir kontribusi terhadap ekonomi kepulauan Sula masih didominasi oleh konsumsi akhir rumah tangga.

Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, meskipun total PDRB ADHB menurut pengeluaran selalu mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhan PDRB ADHBnya cenderung mengalami perlambatan, terutama pada tahun 2020 dan 2021 (Lihat Gambar 3.1). Dimana, pada tahun 2018, laju pertumbuhan PDRB ADHB sebesar 7,99 persen dibanding tahun 2017. Lalu pada tahun 2019 meningkat laju pertumbuhannya menjadi 8,63 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan Kepulauan Sula mengalami perlambatan pada tahun 2020 dan 2021 dimana laju pertumbuhan pada tahun tersebut sebesar 0,93 dan 3,60 persen. Pada tahun 2022, laju pertumbuhannya kembali meningkat signifikan sebesar 10,33 persen dibanding tahun 2020.

**Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022**



\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

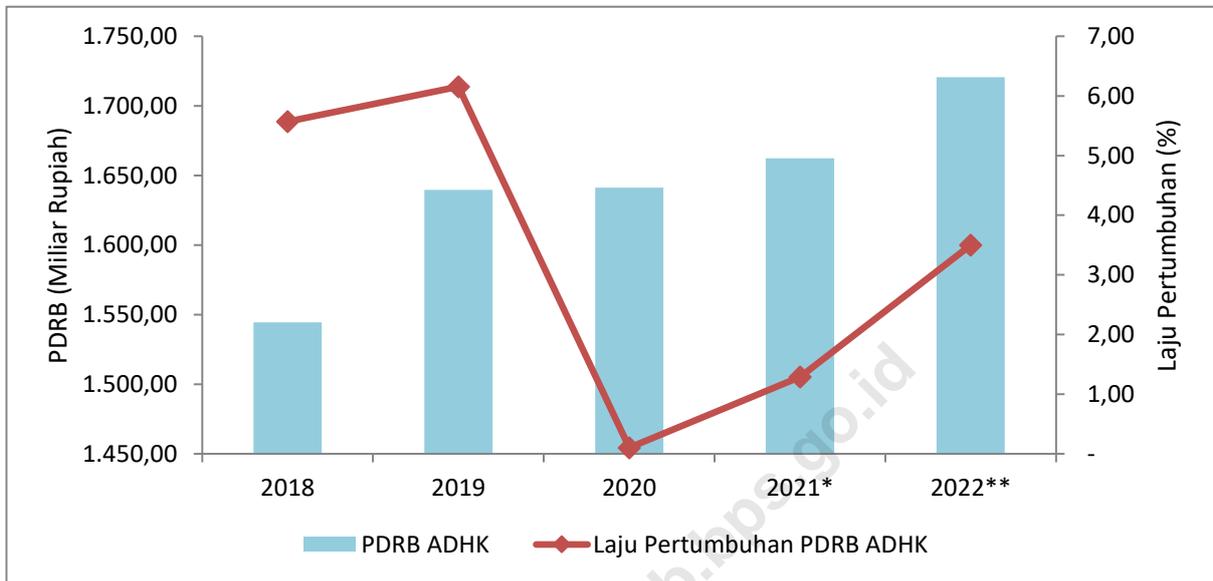
Perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula sisi pengeluaran dari tahun ke tahun didominasi oleh PKRT dan DAN PKP. Angka PKRT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, angka PKRT Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 883,64 miliar rupiah lalu meningkat terus menerus hingga pada tahun 2022 angkanya mencapai 1,04 triliun rupiah. Peningkatan pada komponen PKRT ini menjadi stimulus yang besar terhadap total PDRB Kabupaten Kepulauan Sula terutama di masa pandemi. Akibatnya, angka PDRB Kabupaten Kepulauan Sula masih dapat tumbuh positif setiap tahunnya.

Di sisi lain, perubahan yang berarti juga terjadi pada komponen PKP. Nilai PKP Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang tahun 2022 meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2021, dimana angkanya mencapai 474,90 miliar rupiah dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 371,26 miliar rupiah. Peningkatan komponen PKRT dan PKP ini cukup membantu mengisi kekurangan pada komponen lain yang mengalami pertumbuhan negatif.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini dapat menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Indikator tersebut diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang dievaluasi dengan harga tahun 2010. Penilaian PDRB atas dasar harga konstan akan memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga dapat menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil yang ditunjukkan dengan perubahan volume permintaan atau konsumsi barang dan jasa di suatu wilayah .

Jika dilihat berdasarkan harga konstan, total PDRB Kabupaten Kepulauan Sula juga menunjukkan adanya perubahan yang positif dari tahun ke tahun namun mengalami perlambatan yang cukup signifikan di tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan Gambar 3.2, pada tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kepulauan Sula tercatat sebesar 1,72 triliun rupiah. Angka PDRB ADHK tersebut meningkat sebesar 58,17 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 3,50 persen dari PDRB tahun 2021. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula selama 5 tahun terakhir.

**Gambar 3.2 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022**



\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

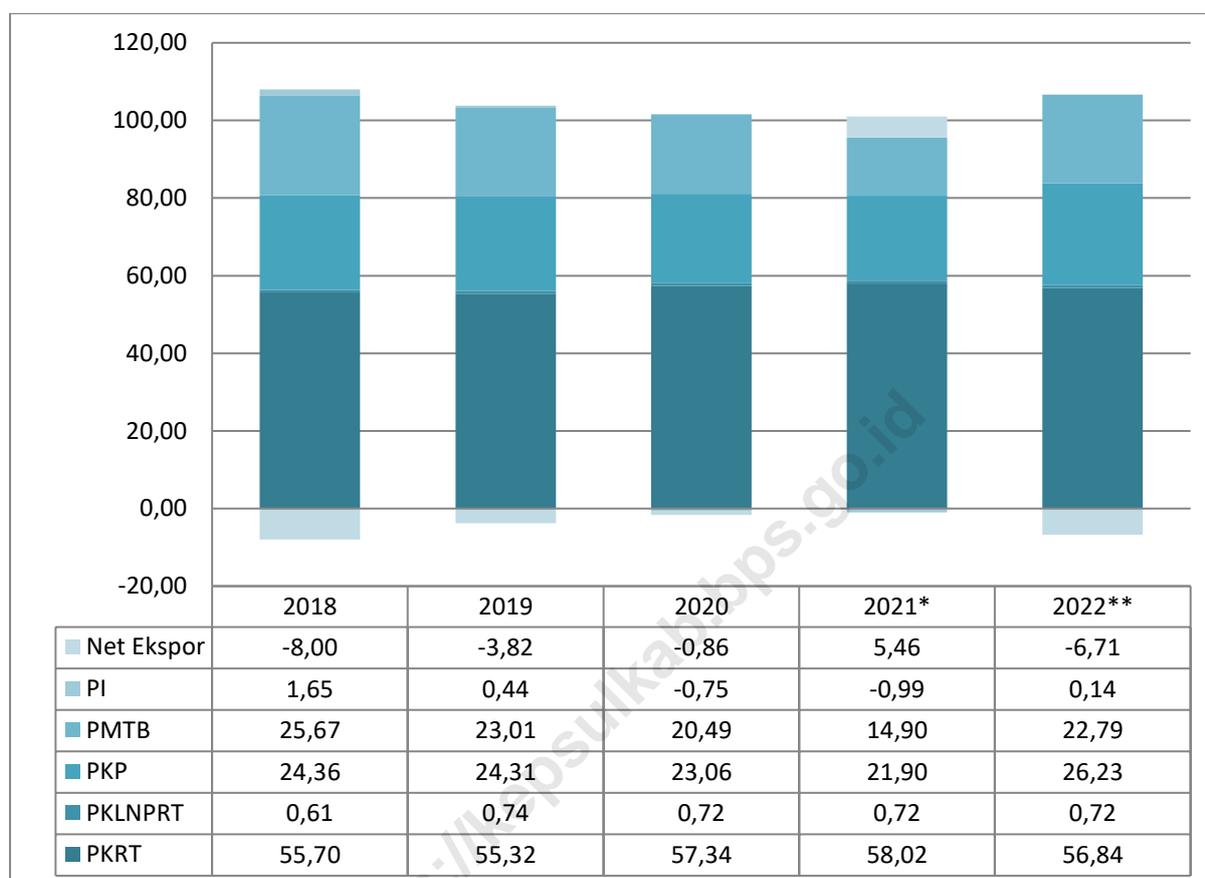
Berdasarkan gambar 3.2 terlihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Sula mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Penurunan laju pertumbuhan yang begitu signifikan terjadi di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2018, nilai PDRB Kepulauan Sula sebesar 1,54 triliun rupiah atau meningkat sebesar 5,57 persen dibanding 2017. Lalu pada tahun 2019 nilai PDRB meningkat menjadi 1,639 triliun rupiah atau meningkat sebesar 6,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 nilai PDRB masing-masing meningkat menjadi 1,641 triliun dan 1,66 triliun rupiah atau hanya mengalami peningkatan sebesar 0,10 persen dan 1,29 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, angka PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Sula meningkat signifikan menjadi 1,72 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 3,50 persen dibanding tahun 2021.

## **Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula Periode 2018-2022**

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Net Eskpor atau Ekspor minus Impor barang dan jasa.

Dari Gambar 3.3 terlihat bahwa selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Kepulauan Sula sebagian besar disumbangkan oleh konsumsi akhir rumahtangga (PKRT) , PKP dan PMTB. Meskipun terbilang cukup fluktuatif selama lima tahun terakhir, kontribusi PKRT terhadap total PDRB Kepulauan Sula terbilang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 dari sisi pengeluaran adalah 57,17 persen dan menjadi 56,20 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 kontribusi PKRT terhadap total PDRB meningkat menjadi 58,12 persen dan kembali meningkat kontribusi pada tahun 2021 menjadi 59,58 persen. Pada tahun 2022, kontribusi PKRT kembali mengalami peningkatan menjadi 60,61 persen. Peningkatan kontribusi PKRT setiap tahunnya menunjukkan bahwa komponen ini masih sangat dominan di perekonomian Kepulauan Sula. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian kepulauan Sula masih mengandalkan konsumsi akhir rumah tangga dibandingkan dengan komponen investasi seperti PMTB.

**Gambar 3.3** Distrizusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022



\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Konsumsi Pemerintah merupakan komponen yang terbilang stabil namun cenderung menurun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula. Pada tahun 2018, kontribusi kedua komponen ini masing-masing sebesar 0,61 dan 24,36 persen. Kontribusi kedua komponen terus mengalami peningkatan dan penurunan kecil hingga pada tahun 2022 kontribusi kedua komponen ini menjadi 0,72 dan 26,23 persen terhadap total PDRB. Untuk Net Ekspor Barang dan Jasa, pada tahun 2022 mengalami kontribusi sebesar negatif 6,71 persen yang menunjukkan bahwa nilai impor barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Sula lebih besar daripada nilai ekspor barang jasa pada tahun tersebut.

## **Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula Menurut Komponen Penyusun PDRB Pengeluaran 2018-2022**

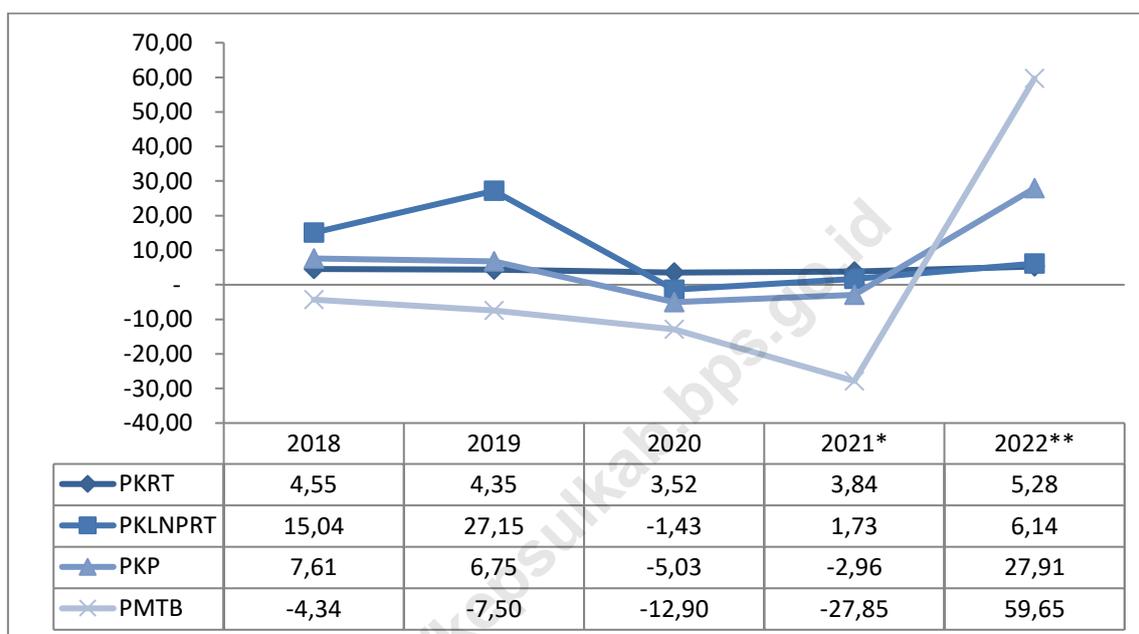
Sebagaimana terlihat dari Gambar 3.2, percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula di tahun 2021 dapat dijelaskan dengan menelaah perubahan di masing-masing komponen penyusun angka PDRB Pengeluaran tersebut. Analisis ini akan memberikan gambaran dari percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula secara lebih fokus.

Komponen pertama yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap total PDRB adalah PKRT. Selama lima tahun terakhir, nilai PDRB ADHK menurut pengeluaran komponen PKRT selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, nilai PDRB komponen ini mencapai 883,06 miliar rupiah dan selalu mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 nilainya mencapai 1,04 triliun rupiah. Meskipun nilai PDRB pada komponen ini terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya cenderung menurun selama lima tahun terakhir dan normal Kembali pada tahun 2022. Pada tahun 2018 pertumbuhann komponen ini sebesar 8,82 persen lalu turun menjadi 7,89 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pertumbuhannya menurun menjadi 4,62 persen pada tahun 2020 dan meningkat sedikit ke level 4,82 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, pertumbuhan komponen ini mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan ke level 8,08 persen dibanding tahun 2021.

Komponen PKLNPRT mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2018 hingga 2019 dan selanjutnya mengalami pertumbuhan negatif tahun 2020 dan normal Kembali pada 2021 dan 2022. Nilai PDRB ADHK komponen ini pada tahun 2018 sebesar 9,88 miliar lalu meningkat menjadi 12,56 dan 12,38 miliar rupiah pada tahun 2019 dan 2020. Dengan kata lain, pada tahun 2020, pertumbuhan nilai PDRB komponen ini sebesar negatif 1,43 persen. Namun, pada tahun 2021, nilai PDRB komponen ini Kembali meningkat menjadi 12,59 miliar rupiah atau naik sekitar 1,73 persen dibanding tahun 2020 Pada tahun 2022,

nilai PDRB komponen ini meningkat kembali menjadi 13,37 miliar rupiah atau tumbuh sekitar 6,14 persen dibanding tahun 2021.

**Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022**



\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Hal serupa juga terjadi pada komponen PKP dimana mengalami pertumbuhan positif dari setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 dan 2021. Nilai PDRB ADHK komponen ini pada tahun 2018 sebesar 557,24 miliar lalu meningkat menjadi 603,95 di tahun 2019 dan menurun menjadi 578,14 dan 568,95 miliar rupiah pada tahun 2020 dan 2021. Dengan kata lain, pada tahun 2019, pertumbuhan nilai PDRB komponen ini sebesar 6,75 persen. Pada tahun 2022, nilai PDRB komponen PKP Kembali meningkat menjadi 751,94 miliar rupiah atau meningkat signifikan disbanding tahun 2021 sebesar 27,91 persen.

Komponen selanjutnya adalah PMTB. PMTB merupakan salah satu komponen dengan kontribusi terbesar disamping PKRT. Dilihat dari nilai PDRB ADHK, komponen ini menjadi yang salah satu komponen yang nilainya selalu diatas 500 miliar rupiah setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2021. Pada tahun 2018 nilai PDRB ADHK komponen ini

mencapai 587,16 miliar rupiah dan menurun menjadi 571,67 miliar rupiah pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 nilai komponen ini menurun cukup signifikan menjadi 513,85 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 12,90 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 nilai komponen ini kembali mengalami penurunan menjadi 387,05 miliar rupiah atau pertumbuhannya negatif 27,85 persen. Pada tahun 2022, komponen ini kembali meningkat cukup signifikan ke level 653,07 miliar rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 59,65 persen. Peningkatan signifikan pada komponen ini didukung oleh aktivitas Konstruksi yang sangat marak di Kabupaten Kepulauan Sula.

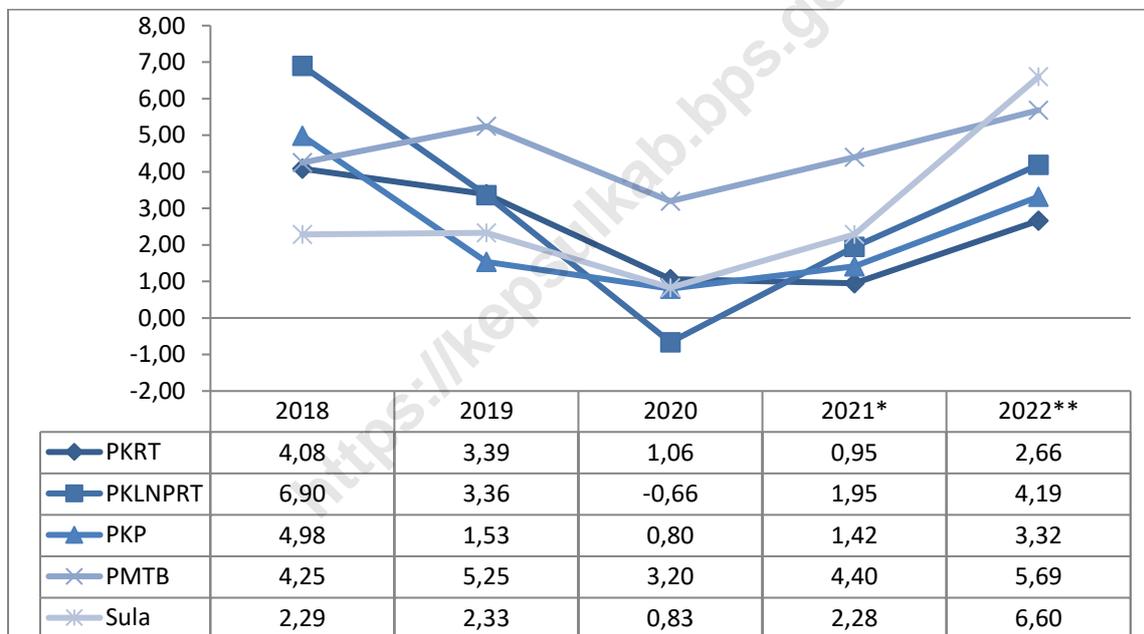
### **Indeks Implisit dan Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran**

Indeks implisit merupakan perbandingan antara PDRB ADHB terhadap PDRB ADHK. Indeks implisit PDRB pengeluaran mampu menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen yakni rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan dalam bentuk konsumsi barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi akhir, investasi maupun ekspor/impor di suatu wilayah pada periode tertentu terhadap harga pada periode tahun dasar (2010) (BPS, 2020). Pertumbuhan indeks implisit menunjukkan laju perubahan harga dari tahun ke tahun terhadap harga tahun dasar (2010).

Berdasarkan Gambar 3.5, secara umum laju indeks implisit Kabupaten Kepulauan Sula mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 hingga 2020, laju indeks implisit terus mengalami penurunan lalu kembali meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2018 laju indeks implisit Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 2,29 persen. Laju tersebut terus mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020 dimana laju indeks implisitnya menjadi masing-masing 2,33 dan 0,83 persen. Pada tahun 2021, laju indeks implisit kembali mengalami peningkatan ke level 2,28 persen. Peningkatan tersebut terus berlanjut hingga pada tahun 2022 laju indeks implisit Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 6,60 persen.

Menurut komponen, laju indeks implisit terbesar dari sisi konsumen pada tahun 2022 adalah pada komponen PKLNPRT dan PMTB. Dimana, pada komponen PKLNPRT laju indeks implisitnya mencapai 4,19 persen pada tahun 2022 Sedangkan pada komponen PMTB, laju indeks implisitnya mencapai 5,69 persen. Untuk komponen PKRT dan PKP laju implisitnya pada tahun 2022 masing-masing sebesar 2,66 dan 3,32 persen.

**Gambar 3.5 Pertumbuhan Indeks Implisit PDRB Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022**



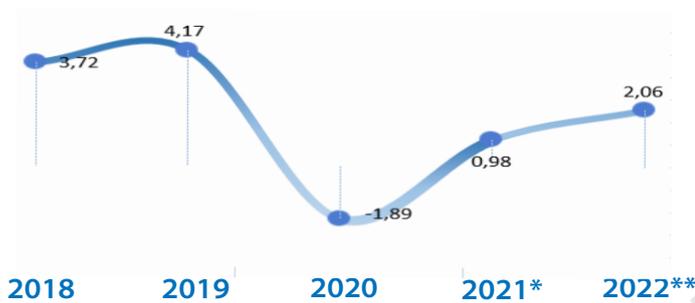
\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

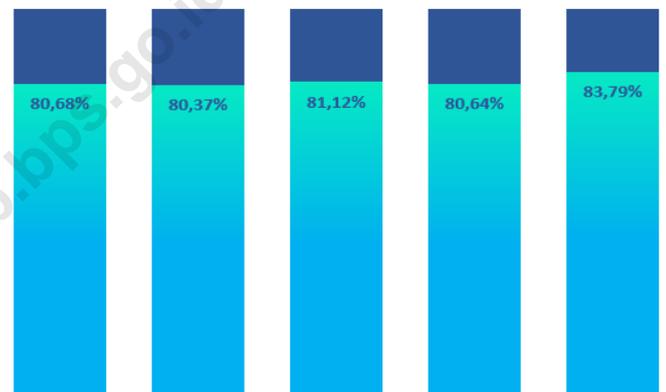
# BAB 4

## PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN

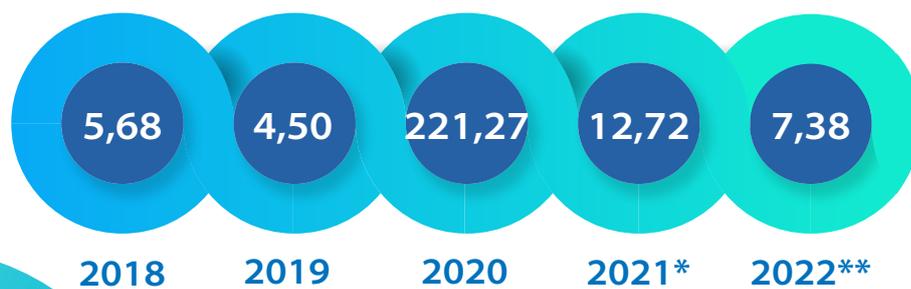
Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)  
Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022



Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap  
PDRB Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022\*



*Incremental Capital Output Ratio*  
Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022



\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara



## PDRB Nominal

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

PDRB Nominal menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PDRB</b>					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.287,17	2.484,46	2.507,63	2.597,92	2.866,21
b. ADHK (Miliar Rp)	1.544,54	1.639,60	1.641,28	1.662,42	1.720,60
<b>Jumlah penduduk (Jiwa)</b>	100967	102886	104971	105293	106778
<b>PDRB Perkapita</b>					
a. ADHB (Juta/Jiwa)	22,65	24,15	23,89	24,67	26,84
b. ADHK 2010 (Juta/Jiwa)	15,30	15,94	15,64	15,79	16,11
<b>Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)</b>	<b>3,72</b>	<b>4,17</b>	<b>-1,89</b>	<b>0,98</b>	<b>2,06</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sejak tahun 2018, PDRB Perkapita selalu mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Angka PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku di tahun 2018 sebesar 22,65 juta rupiah per jiwa. Pada tahun 2022, nilainya meningkat menjadi 26,84 juta rupiah per jiwa. Sedangkan angka PDRB Perkapita atas dasar harga konstan di tahun 2018 sebesar 15,30 juta rupiah per jiwa, nilainya meningkat menjadi 16,11 juta per jiwa.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

## Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, ketiga institusi ini sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk melakukan konsumsi akhir.

Berdasarkan teori makro ekonomi, dalam keadaan normal, pola konsumsi baik rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah akan selalu mengalami peningkatan. Pada dasarnya kebutuhan manusia akan bertambah dari waktu ke waktu. Peningkatan kebutuhan tersebut diiringi dengan inflasi atau peningkatan nilai barang dan jasa sehingga menyebabkan peningkatan nilai konsumsi akhir ketiga institusi tersebut dalam PDRB ADHB.

**Tabel 4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
a. Rumah Tangga (Miliar Rp)	1.274,00	1.374,48	1.437,98	1.507,34	1.629,13
b. LNPRT (Miliar Rp)	13,99	18,38	18,00	18,66	20,64
c. Pemerintah (Miliar Rp)	557,25	603,95	578,15	568,97	751,94
Jumlah Konsumsi Akhir (Miliar Rp)	1.845,23	1.996,82	2.034,13	2.094,97	2.401,72
PDRB ADHB (Miliar Rp)	2.287,17	2.484,46	2.507,63	2.597,92	2.866,21
<b>Proporsi (%)</b>	<b>80,68</b>	<b>80,37</b>	<b>81,12</b>	<b>80,64</b>	<b>83,79</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 4.2, proporsi konsumsi akhir di Kabupaten Kepulauan Sula cenderung mengalami fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2018, konsumsi akhir baik rumah tangga, LNPRT, maupun pemerintah menyumbang 80,68 persen dan menurun menjadi 80,37 persen pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 proporsi konsumsi akhir naik menjadi 81,12 persen menurun menjadi 80,64 persen pada tahun 2021 dan meningkat Kembali menjadi 83,79 persen tahun 2022. Adanya kecenderungan proporsi konsumsi akhir menurun menunjukkan bahwa total PDRB perlahan mulai diperkuat oleh komponen lain seperti investasi yang dalam hal ini ialah PMTB.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

## Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana:  $I_t$  = PMTB tahun ke t

$Y_t$  = Output tahun ke t

$Y_{t-1}$  = Output tahun ke t-1

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa nilai ICOR mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2018–2022. Adapun penurunan atau peningkatan angka ICOR menunjukkan perubahan baik dalam proses produksi. Penurunan atau peningkatan angka ICOR merupakan indikasi terjadinya efisiensi terutama efisiensi

penggunaan dan pemeliharaan kapital dalam mencapai suatu output tertentu. Artinya, semakin sedikit kapital yang diperlukan untuk mencapai output yang diinginkan pada periode tertentu.

**Tabel 4.3 Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kepulauan Sula, 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.544,54	1.639,60	1.641,28	1.662,42	1.720,60
Perubahan (Miliar Rp)	81,51	95,06	1,69	21,14	58,17
PMTB ADHK 2010 (Miliar Rp)	462,74	428,05	372,85	269,00	429,46
<b>ICOR</b>	<b>5,68</b>	<b>4,50</b>	<b>221,27</b>	<b>12,72</b>	<b>7,38</b>

\*Angka Sementara

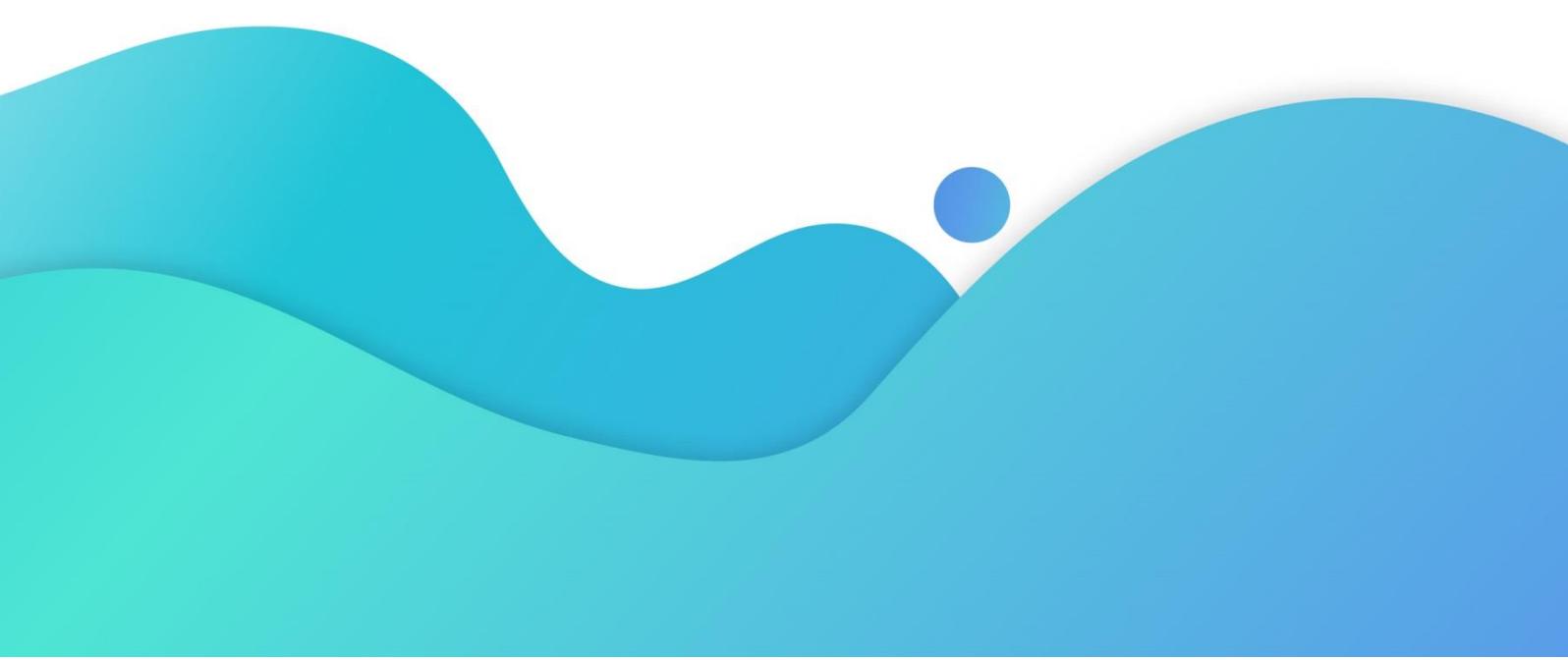
\*\*Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2018, ICOR Kepulauan Sula mencapai angka 5,68. Kondisi ini berarti bahwa untuk menambah 1 unit output diperlukan penambahan kapital sebesar 5 unit. Pada tahun 2019 angka ICOR Kabupaten Kepulauan Sula mengalami penurunan menjadi 4,50. Kondisi ini berarti bahwa untuk menambah 1 unit output diperlukan penambahan kapital sebesar 4 unit, Pada tahun 2020 angka ICOR Kembali mengalami peningkatan menjadi 221,27 yang berarti untuk menambah 1 unit output diperlukan penambahan kapital sebesar 221 unit. Kondisi ini berkaitan dengan melambatnya nilai total PDRB ADHK di tahun 2020. Penurunan nilai PMTB yang tidak sebanding dengan lambatnya laju PDRB menyebabkan peningkatan nilai ICOR yang tajam. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa proses produksi di tahun 2020 membutuhkan kapital yang besar namun memberikan output yang kurang maksimal. Selanjutnya pada tahun 2021 angka ICOR mengalami penurunan signifikan menjadi 12,72 yang menunjukkan untuk menambah 1 output diperlukan penambahan kapital sebesar 12 unit. Lalu angka ICOR Kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 7,38 yang menunjukkan untuk menambah 1 output diperlukan penambahan kapital sebesar 7 unit.



**BAB  
5**

**PENUTUP**



<https://kepsulkab.bps.go.id>



1. Unit institusi dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 s.d 2022, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 s.d 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara

agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula terhadap ekonomi luar daerah.

<https://kepsulkab.bps.go.id>

**BAB  
6**

**LAMPIRAN**

<https://kepsulkab.bps.go.id>



**Tabel 1. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2018 – 2022**

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.274,00	1.374,48	1.437,98	1.507,34	1.629,13
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	13,99	18,38	18,00	18,66	20,64
3. Konsumsi Pemerintah	557,25	603,95	578,15	568,97	751,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	587,17	571,67	513,86	387,05	653,07
5. Perubahan Inventori	37,77	10,82	-18,80	-25,85	3,88
6. Net Ekspor	-183,00	-94,85	-21,56	141,75	-192,46
<b>PDRB</b>	<b>2.287,17</b>	<b>2.484,46</b>	<b>2.507,63</b>	<b>2.597,92</b>	<b>2.866,21</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 2. PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Miliar Rupiah), 2018– 2022

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	883,06	921,48	953,92	990,53	1.042,85
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	9,88	12,56	12,38	12,60	13,37
3. Konsumsi Pemerintah	377,42	402,88	382,59	371,26	474,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	462,74	428,05	372,85	269,00	429,46
5. Perubahan Inventori	12,20	4,45	-7,49	-15,76	2,59
6. Net Ekspor	-200,77	-129,83	-72,98	34,79	-242,58
<b>PDRB</b>	<b>1.544,54</b>	<b>1.639,60</b>	<b>1.641,28</b>	<b>1.662,42</b>	<b>1.720,60</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2018– 2022**

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,55	4,35	3,52	3,84	5,28
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	15,04	27,15	-1,43	1,73	6,14
3. Konsumsi Pemerintah	7,61	6,75	-5,03	-2,96	27,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-4,34	-7,50	-12,90	-27,85	59,65
<b>PDRB</b>	<b>5,57</b>	<b>6,15</b>	<b>0,10</b>	<b>1,29</b>	<b>3,50</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2018 – 2022**

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,08	3,39	1,06	0,95	2,66
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	6,90	3,36	-0,66	1,95	4,19
3. Konsumsi Pemerintah	4,98	1,53	0,80	1,42	3,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,25	5,25	3,20	4,40	5,69
5. Perubahan Inventori	2,29	2,33	0,83	2,28	6,60
6. Net Ekspor	22,58	-19,84	-59,57	1279,24	-80,53
<b>PDRB</b>	<b>2,29</b>	<b>2,33</b>	<b>0,83</b>	<b>2,28</b>	<b>6,60</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Kepulauan Sula (Persen), 2018 – 2022

KOMPONEN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	55,70	55,32	57,34	58,02	56,84
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0,61	0,74	0,72	0,72	0,72
3. Konsumsi Pemerintah	24,36	24,31	23,06	21,90	26,23
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,67	23,01	20,49	14,90	22,79
5. Perubahan Inventori	1,65	0,44	-0,75	-0,99	0,14
6. Net Ekspor	-8,00	-3,82	-0,86	5,46	-6,71
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara





**BAB  
7**

**DAFTAR PUSTAKA**



<https://eprintsulkaab.bps.go.id>



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

— Enlighten The Nation —



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
*BPS-Statistics of Kepulauan Sula Regency*

Jln. Yos Sudarso, KM.10, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara,  
Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara  
Website : [taliabukab.bps.go.id](https://taliabukab.bps.go.id) | Email : [bps8203@gmail.com](mailto:bps8203@gmail.com)